

i. References

- Abrar. (1999). Hak penguasaan negara atas pertambangan berdasarkan undang-undang dasar 1945. *Disertasi Universitas Padjadjaran*.
- Alberto, T. (2016). *Pemberantasan Korupsi Pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi*. Redaksi Berita Transparansi.
- Amanah Rakyat Nusantara*. (2012, Agustus). Retrieved from Kronologi Penyelidikan Kasus Simulator:
<https://amanahrakyatnusantara.wordpress.com/2012/08/13/kronologi-penyelidikan-kasus-simulator/>
- Apriyani, N. (2016). Analisis Berita KPK vs POLRI (Frame Analysis Model Gamson pada Majalah Tempo Edisi 9-22 Februari 2015).
- Arbi Sumandoyo, Reja Hidayat. (2017, April 12). *Pungli dan korupsi di kepolisian kita*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/pungli-dan-korupsi-di-kepolisian-kita-cmwK>
- Ashiddique, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.
- Asshiddiqie, J. (2008). Menuju Negara Hukum yang Demokratis.
- Bagir manan. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. *Makalah pada Seminar Nasional, Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir*, 1-2.
- Baskoro, B. D. (2013). Perseteruan KPK dengan POLRI Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 336-345.
- Baskoro, B. D. (2013). Perseteruan KPK dengan POLRI dalam upaya pemberantasan korupsi. *Masalah-masalah Hukum*, 43(3), 336-345.
- Bernard, R. (2007). Teori Sosiologi Modern. 54.
- Bohari. (2001). Jejak Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. 9.
- Brouwer, J.G. dan Schilder. (1998). A Survey of Dutch Administrative Law.

- Daniel, H. (2015, Juni 17 Juni 2015). *Perbedaan “Cicak vs Buaya” Jilid 3 dengan Jilid 1 dan 2*. Retrieved from https://www.kompasiana.com/danielht/perbedaan-cicak-vs-buaya-jilid-3-dengan-jilid-1-dan-2_54f36c227455137f2b6c7524
- Dany Haryanto dan Edwy Nugroho. (2011). *Pengantar Sosiologi Dasar*. 113.
- Darwan, P. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 11.
- Desyana, C. (2012, Agustus). *Tempo.co*. Retrieved from Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (II): <https://nasional.tempo.co/read/420678/lika-liku-kasus-simulator-sim-versi-polisi-ii>
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. 23.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. IV, 90.
- Hantoro, N. M. (2015). *Pembenahan Lembaga KPK: Solusi Jangka Panjang Konflik KPK dan Polri. Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis*, VII(03).
- Haugaard, M. (2010). *Democracy, Political Power, and Authority. Social Research*, 77(4), 1049-1074. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23347119>
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. 35.
- HR, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. 71.
- Husin, B. R. (2014). *Studi lembaga penegak hukum*. 15.
- Intan. (2013). *Analisis tindakan Polri dan KPK dalam kasus simulator SIM dikaitkan dengan politik kriminal*.
- Jemadu, A. (2017, February). *Challenges in Eradicating Corruption in the Indonesian Presidential System. Centre for International Governance Innovation Paper*(119).
- Juditha, C. (2014). *Public Opinion on Case “Police Versus KPK” in Twitter. Jurnal Pekommas*, 17(2), 61-70.
- Kelana, M. (1972). *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, 18.

- Khotimah, S. N. (2015). Kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap penyelesaian konflik KPK vs POLRI kasus Budi Gunawan dan Bambang Widjanto dalam perspektif siyasah.
- Kominfo.go.id. (2013). Retrieved from https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
- Kompas.com. (2010, March). *PERC: Indonesia Negara Paling Korup!* Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/PERC.Indonesia.%20Negara.Paling.Korup>.
- Kompas.com*. (2012). Retrieved from *Penyidik KPK Masih Bertahan di Gedung Korlantas:* <https://lifestyle.kompas.com/read/2012/07/31/18002811/penyidik.kpk.masih.bertahan.di.gedung.korlantas>
- Kompas.com. (2015). Retrieved from *Ada Motif Kekuasaan di Balik Konflik KPK Vs Polri:* <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/27/18211771/Ada.Motif.Kekuasaan.di.Balik.Konflik.KPK.vs.Polri>
- KPK. (2017). *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Retrieved from Anti Corruption Clearing House: <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>
- KPK.go.id. (n.d.). *Struktur Organisasi*. Retrieved February 2018, from <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>
- Lauer, D. R. (2001). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*.
- Maharani, D. (2012, Agustus 4). *Kronologi Penyelidikan Kasus Simulator Versi Polri*. Retrieved from Kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/04/10353221/Kronologi.Penyelidikan.Kasus.Simulator.Versi.Polri>
- Mazrieva, E. (2017, January). *VoA Indonesia*. Retrieved from Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90:

<https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-3692750.html>

- Mukti, F. (2002). Korupsi dan Penegakan Hukum dalam pengantar.
- Nazriyah, R. (2012). Kewenangan Komisis Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri vs KPK). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 586-600.
- News.com, A. (2009). Retrieved from Survei: Ada Motif di Balik Konflik KPK-Polri: <https://www.antaraneews.com/berita/157925/survei-ada-motif-di-balik-konflik-kpk-polri>
- Nurmayani S.H., M. (2009). Hukum Administrasi Daerah. 26.
- Nurudin. (2013). Opini Publik Sebagai The Fifth Estate. *Harian Jurnal Nasional*.
- Permatasari, D. (2016). Kasus korupsi simulator sim dan pencucian uang Inspektur Jendral Polisi Djoko Susilo.
- Poernomo, H. (2013). Berani Korupsi itu Memalukan. p. 17.
- Prakoso, D. (1987). Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana. 8.
- Prodjodikoro, W. (1980). Asas-asas hukum tata negara di Indonesia. 5.
- Pupun Sofiyati, dkk. (2011). Konflik dan Stress. 9.
- Rachnaningsih, R. (2013). Benturan kewenangan Polri dan KPK sebagai penyidik dalam kasus Simulator SIM (Kajian Yuridis Penyelesaian Melalui Memorandum of Understanding). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(3).
- Rastika, I. (2013, April). *Kerugian Negara dalam Proyek Simulator SIM Jadi Rp 121 Miliar*. Retrieved from Kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/01/17360584/Kerugian.Negara.dalam.Proyek.Simulator.SIM.Jadi.Rp121.Miliar>
- Rompas, H. W. (2016). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. *Lex Administratum*, IV(3).

- Sahid, A. A. (2015, Agustus 2). Konflik KPK vs POLRI Jilid III: Konstestasi kuasa dalam pnegakan hukum di Indonesia. *17(02)*.
- Sahid, A. A. (2015). Konflik KPK vs Polri jilid III: Kontestasi kuasa dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Asy-Syari'ah*, *18(1)*.
- Sari, N. (2009). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Sjaf, S. (2010). Memahami Akar dan Ragam Teori Konflik.
- Soehino. (2000). Ilmu Negara. 149.
- Soekanto, S. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar. 86.
- Tarigan, I. A. (2015, February 13). *Melihat Perbincangan Konflik KPK VS Polri di Media Sosial*. Retrieved from MetroTV News.com: <http://teknologi.metrotvnews.com/read/2015/02/13/357782/melihat-perbincangan-konflik-kpk-vs-polri-di-media-sosial>
- Tatuil, G. S. (2013, July). Penyelesaian sengketa atas kewenangan KPK dan Polisi dalam menangani kasus korupsi. *Lex et Societatis*, *1(3)*.
- Tauda, G. A. (2012). *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Thalib, A. R. (2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. 219.
- Tribun Timur*. (2015, January 25). Retrieved from Dampak Jika Polemik KPK-Polri Berlarut: <http://makassar.tribunnews.com/2015/01/25/dampak-jika-polemik-kpk-polri-berlarut>
- Turner, J. (1998). *The Structure of Sociological Theory* (sixth edition).
- Utomo, W. H. (2005). Hukum Kepolisian di Indonesia. 5.
- Wahyu Aji, Fajar Anjungroso. (2016, Oktober 25). *Direktur Perusahaan yang Tersangkut Kasus Simulator SIM Divonis 4 Tahun Bui*. Retrieved from Tribunnews.com: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/25/direktur-perusahaan-yang-tersangkut-kasus-simulator-sim-divonis-4-tahun-bui>

- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 38-52.
- Wardhani, I. S. (2015, February 2). *Kompas.com*. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/16590421/Mencari.Penyelesaian.Konflik.KPK-Polri>
- Winarno, N. B. (2008). Pnyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.
- Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi dan penelitian).

ii. Appendix

- i. Document of Memorandum of Understanding Attorney General's Office, Nation Police, and Corruption Eradication Commission in 2012